

Malam Ini Debat Perdana Calon Pemimpin RI

JAKARTA-Malam ini (17/1), sekitar pukul 20.00 WIB. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Debat Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta. Debat perdana itu mengambil tema penegakan hukum dan penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham), penindakan terorisme serta pemberantasan korupsi. Kedua pasangan capres dan cawapres, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan beradu gagasan di hadapan publik. Tentu berdasar visi dan misi yang telah dimilikinya.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengatakan, visi dan misi mereka kurang begitu meyakinkan dalam penegakan hukum untuk korupsi berskala besar dan pelanggaran HAM yang berat. Meski dalam debat nanti pembahasan berkaitan dengan kasus tak akan dibahas. "Semakin kurang meyakinkan karena tampaknya KPU mengakomodir permintaan kedua kubu untuk tidak memasukkan pembahasan kasus HAM dan korupsi. Masih terdapat kesempatan untuk KPU merubah keputusannya," ujarnya kepada INDOPOS di Jakarta, Rabu (16/1).

Menurutnya, tidak pernah terlihat keseriusan masing-masing pihak untuk menyelesaikan kasus Ham pelanggaran berat. Padahal undang-undang memerintahkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat kebijakan penyelesaian kasus pelanggaran Ham masa lalu. "Selama mereka mengelola lembaga negara baik pemerintah mampu sebagai partai pendukung maupun oposisi di DPR sama-sama kurang terlihat sungguh-sungguh mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat," jelas mantan anggota Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir Said itu.

Terlebih, lanjut Usman, upaya pemberantasan dalam kasus korupsi yang melibatkan pelaku politik dan penegak hukum hanya sebatas proses pemberantasan pungutan liar (pungli) dalam dunia usaha dan investasi ■

Bakal Normatif

03 - 17 Jan '19 (1a)

rgan dari halaman 1

1 isu hukum dan HAM sangat relevan dalam debat Pilpres ini?

presiden yang nantinya terpilih i kontrak politik kepada ma- Diatur dalam UUD 1945. Sebagai ukum masyarakat bisa menge- formi apa yang akan digunakan calon presiden dan wakil pres- n menegakkan hukum. Karena n dan HAM ini berkaitan dengan a sebagai konstitusi.

ya masyarakat wajib menonton

kita dapat mengetahui argumen digunakan masing-masing palon dalam persoalan pekekan an HAM yang terjadi hari-hari ama kasus-kasus yang tidak terungkap. Misalnya, persoalan gan terhadap Novel Baswedan : senior KPK), serta kasus-kasus ang terjadi di daerah.

nggulan visi-misi gagasan pas- on nomor 01?

1 poin gagasan hukum pasan- wi-Ma'ruf, ada beberapa poin aya yang menarik yakni, poin , dan 9. Lima poin itu menurut iliki nilai lebih. Karena secara paslon 01 mampu menunjuk- gakkan hukum dalam visi dan yang cukup jelas. Selebihnya kanaan poin yang menarik se- lindungan kaum difabel, juga an dan anak.

1 kekurangannya?

i petahana, Jokowi harus bisa ahankan argumennya terhadap misi yang telah dibuat. Karena eberapa tahun berkuasa, ada a catatan penegakkan hukum m diselesaikan. Salah satunya ayan calon 01 menurut saya ebat harus bisa menjelaskan n itu.

n apa yang harus dipertahankan? a poin yang harus dipertahan- tama, dalam poin empat yang sikan soal melanjutkan penye-

lesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Memang ada inisiatif dari pemerintahan Jokowi untuk menun- taskan pelanggaran HAM di masa lalu. Tapi tidak terlalu kuat. Ini justru upaya tersebut terjadi pelemahan, misalnya terjadi konflik antara Komnas HAM dengan Kejaksaan terhadap pengusu- tan kasus HAM 1998 dan 1965. Sebagai bawahan presiden, Jaksa Agung har- sunya tidak boleh mengatakan berkas kasus-kasus tersebut masih mengalami kekurangan. Sehingga terkesan terjadi pelemahan terhadap pengusutan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Kemudian pada poin 6, Jokowi masih punya utang mempertahankan hak-hak masyarakat adat untuk bisa mendapat perlindungan hukum yang sampai seka- rang tidak tuntas.

Pada poin 8, terkait melindungi hak- hak masyarakat di bidang pertanahan, ini bisa menjadi sasaran kritik dari paslon 02. Ini seperti reformasi agraria yang dilakukan, sebenarnya itu hanya untuk mengadministrasi lahan-lahan milik masyarakat yang belum terdata se- cara legal. Seharusnya reformasi agraria itu mampu meredistribusi tanah agar lebih merata kepada masyarakat. Kemu- dian, mampu menyelesaikan persoalan perampasan tanah milik masyarakat di masa lalu. Sebagai contoh, adanya kasus di Jawa Timur yang tidak selesai.

Kemudian catatan saya terakhir ada poin 11. Dalam poin tersebut, dijelaskan bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf ingin meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif dalam rangka per- lindungan dan penegakan HAM. Pada- hal, perlu evaluasi terhadap tumpang tindih kebijakan serta dampak kinerja. Padahal yang harus dilakukan adalah mengembangkan sistem layanan publik dalam isu HAM.

Bagaimana dengan visi-misi dari pasa- ngan Prabowo-Sandi?

Dalam pandangan saya, ada bebera- pa poin menarik. Seperti menghenti- kan persekusi dalam poin ketiga, juga mengembalikan dan menjamin kebe- basan pers yang bertanggung jawab. Dua poin itu menjadi pembeda terhadap paslon 01. Ini juga keinginan menegak- kan kembali kebebasan mimbar aka-

demik. Ini menjadi isu yang tidak biasa dan cukup unik.

Ketiga poin tersebut menarik un- tuk dibedah seperti poin menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik, dalam riset yang saya lakukan, terdapat 67 kasus di tingkat universitas selama pemerintahan Jokowi. Kasus itu meliputi kebebasan institusi pendidikan. Seperti pembubaran diskusi dan lain-lain.

Kelebihan lainnya?

Soal persekusi ini harusnya bisa mem- berikan ruang terhadap kaum minorit- as untuk lebih menyuarakan pendapat. Pendapat yang harus dibangun dari paslon 02 adalah jaminan terhadap seluruh warga negara yang mendapat persekusi dari pihak manapun.

Nah, soal mengembalikan kebe- basan pers memang menjadi poin pembeda. Tapi ada kesalahan bahasa. Kata mengembalikan itu patut men- jadi pertanyaan. Sebab, sejak era Orda Baru (Orba) hingga Reformasi masih ada kasus kekerasan terhadap awak media. Padahal harusnya adalah bisa menegakkan hukum terhadap pers di Indonesia. Karena sejak dibuatnya UU Nomor 40/1999 tentang Pers, belum ada satu kasus pun penggunaan Pasal 18 Ayat 1. Tapi, baru saya temukan satu kasus di Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang prosesnya masih tertatih-tatih. Argu- men lain yang harus dibangun dalam poin kebebasan pers harus juga untk menghindari penguasaan ekonomi dan politik pada media massa mainstream.

Terakhir soal poin menjamin para seni- man berekspresi. Ini bisa jadi poin yang bagus, tapi juga berbahaya. Karena kita tahu, seniman Wiji Thukul yang hilang pada masa Orba. Sementara, capres 02, memiliki track record pernah memimpin organisasi militer. Tapi, jika ada keingi- nan dan komitmen untuk membongkar tentu akan menarik. Jadi pasangan calon 02, harus siap-siap jika mendapat per- tanyaan dari pasangan Jokowi-Ma'ruf terkait isu tersebut.

Jadi apa yang harus dilakukan paslon 02?

Seharusnya, pasangan ini mampu ber- pikir dari hulu hingga hilir. Sayangnya, mereka hanya melihat persoalan hulunya saja. Karena persoalannya kompleks.

Sebaiknya, pasangan ini bisa men- guatkan argumennya pada menjamin proses hukum yang tepat. Jangan sampai peradilan justru digunakan sebagai alat represif. Saya melihat, pada poin untuk meningkatkan supremasi hukum itu ada bagusya. Namun, yang patut dik- etahui, eksekutif sejatinya tidak boleh campur tangan dalam institusi kehaki- man. Tapi yang bisa dilakukan adalah membenahi sistem di dalamnya. Karena korupsi rentan sekali terjadi sektor pera- dilan, dan kontrol putusan kebijakan. Nah, hal seperti itu tidak pernah dia- tasi. Pekerjaan lainnya adalah paslon ini juga harus mampu memerhatikan kedaulatan rakyat.

Apa yang harusnya dilakukan kedua paslon terhadap isu HAM ini?

Ada beberapa poin pada catatan saya yang menjadi persoalan yakni, impu- nitas. Kemudian, kekerasan atas nama negara, yang memfasilitasi kuasa modal, ekonomi politik. Lemahnya perlindungan jaminan sosial dan layanan pub- lik yang belum sepenuhnya orientasi perlindungan hak publik. Eksploitasi sumber daya alam secara ekensif, dengan menggunakan instrumentasi hukum, peradilan. Terakhir kebijakan lembaga negara serta tekanan terhadap kebebasan ekspresi dan kebebasan akademik. Isu- isu tersebut menjadi persoalan HAM saat ini. Harusnya, kedua pasangan calon bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut dalam debat pertama ini.

Apakah dalam debat ini akan berpengaruh dalam proses elektoral?

Saya rasa iya. Karena sebenarnya isu hukum dan HAM adalah isu yang sensi- tif. Ini terutama bagi para pemilih yang status ekonomi berada di kelas menen- gah. Karena mereka mendapat akses informasi yang lebih dalam. Karena isu hukum dan HAM ini butuh pendalaman akses informasi lebih dalam. Tidak bisa yang di permukaan saja. Tergantung nanti tiap pasangan apakah bisa men- gunakan bahasa yang lebih populer dan argumentasi rasional. Karena penggu- naan bahasa akan sangat berpengaruh terhadap memberikan pemahaman ke- pada masyarakat. Meski saya prediksi debatnya sendiri akan normatif. (*)